

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengungkapan *sustainability report* di Indonesia mengalami tren positif setiap tahunnya, hal itu dibuktikan terus meningkatnya jumlah perusahaan yang mengungkapkan *sustainability report* di masing-masing *website* resmi perusahaan. Dimulai tahun 2006 hanya ada 1 perusahaan yang terdaftar di *website Global Reporting Initiative* (GRI) melaporkan *sustainability report* yaitu PT Kaltim Prima Coal Tbk. Kemudian di tahun 2014 menjadi 34 perusahaan dan tahun 2015 meningkat 58 perusahaan yang mengungkapkan *sustainability report* sesuai dengan GRI-G4 (GRI, 2017). Konsep *triple bottom line* (*profit, people, planet*) menjadi dasar utama dalam membangun *sustainability development* yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengganggu kemampuan generasi berikutnya dalam memenuhi kebutuhan mereka (Latifah, 2016). Selain itu juga pihak masyarakat mempunyai anggapan bahwa suatu perusahaan dalam kegiatan operasional hendaknya memperhatikan aspek-aspek sosial dan lingkungan (Anindita, 2014).

Dampak yang ditimbulkan atas tragedi kemanusiaan dan lingkungan di Indonesia diakibatkan kurangnya kepedulian perusahaan, seperti kasus lumpur panas oleh PT. Lapindo Brantas di Sidoarjo, kasus pencemaran teluk buyat oleh PT. Newmont Minahasa Raya di Minahasa Selatan, kasus konflik masyarakat Aceh dengan ExxonMobil yang mengelola gas alam di Arun, dan kasus pemberdayaan masyarakat suku oleh PT. Freeport di Papua (Nasir *et al.*, 2014).

Kasus PT. Lapindo Brantas merupakan salah satu dampak nyata yang terjadi dan merugikan banyak pihak akibat kelalaian perusahaan dan kesalahan prosedural dalam eksplorasi penggalan sehingga menyebabkan semburan gas dan lumpur panas yang menimbulkan kerusakan alam dan sosial ekonomi masyarakat sekitar (Latifah dan Mawardi, 2017).

Berbagai Peraturan dan Undang-Undang telah dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mendukung *sustainability development* di Indonesia. Diantaranya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas (PT), bahwa setiap “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”. Dalam Pasal 66, disebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, Perseroan Terbatas juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Republik Indonesia, 2007). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Pasal 22 tentang mewajibkan adanya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan (Republik Indonesia, 2009). Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian yang dijelaskan pada Pasal 79, disebutkan bahwa Standar Industri Hijau (SIH) paling sedikit memuat ketentuan mengenai bahan baku, bahan penolong, energi, proses produksi, produk, manajemen perusahaan dan pengelolaan limbah. Selain itu untuk Pedoman Penyusunan Standar Industri Hijau (Republik Indonesia, 2014).

Sustainability report merupakan sebuah laporan yang dikeluarkan secara sukarela (*voluntary*) oleh perusahaan dan praktik nyata dari konsep *sustainability development*, yang terdiri dari 3 aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. *sustainability report* dapat memberikan gambaran yang seimbang akan kinerja berkelanjutan dari suatu organisasi baik kontribusi positif maupun negatif (Anindita, 2014). Dalam perkembangannya *Global Reporting Initiative* (GRI) telah membuat standar penyusunan *sustainability report* atau yang lebih dikenal dengan GRI-G4. Laporan yang diterbitkan setelah 31 Desember 2015 harus disusun sesuai dengan pedoman G4. Selain itu, GRI menyarankan agar organisasi atau perusahaan melaporkan untuk kali pertama menggunakan pedoman G4, walaupun belum memenuhi persyaratan opsi sesuai pelaporan pertama. GRI-G4 dibagi menjadi 91 indikator yang terdiri dari 9 indikator ekonomi, 48 indikator sosial dan 34 indikator lingkungan. Prinsip-prinsip dalam menentukan konten pelaporan mencakup pelibatan pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, materialitas dan kelengkapan (GRI, 2013).

Lahirnya mekanisme *corporate governance* dimana menyatakan bahwa suatu perusahaan harus memperhatikan dan melindungi kepentingan *stakeholder* demi kelangsungan hidup perusahaan atau yang disebut dengan *going concern* (Aziz, 2014). Tata kelola perusahaan dilandasi oleh 5 prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Dalam pedoman umum yang dikeluarkan oleh KNKG, bahwa organ perusahaan mempunyai peran yang vital dalam pelaksanaan *corporate governance* yang terdiri dari RUPS, dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit. *Sustainability report* dan

corporate governance merupakan dua hal yang memberikan manfaat dan dampak bagi *stakeholder* atau pemangku kepentingan (KNKG, 2006).

Banyak peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian terkait pengaruh kinerja perusahaan dan *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Sebagian besar dari penelitian di atas menggunakan *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDI) untuk mengukur pengungkapan *sustainability report*. Hasil dari penelitian di atas menunjukkan hasil yang berbeda-beda, penelitian yang dilakukan oleh Adhipradana dan Daljono (2014) menyatakan bahwa adanya pengaruh antara perusahaan yang mengungkapkan *sustainability report* dengan perusahaan yang tidak mengungkapkan *sustainability report* apabila dilihat dari variabel total aset, total karyawan dan *governance committee*. Sementara Anindita (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa total aset tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*, hal ini dikarenakan perusahaan menganggap hanya sedikit aspek yang dipandang material untuk diungkapkan dalam *sustainability report*.

Nasir *et al.* (2014) menyatakan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan ROA dan DER berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*, sedangkan hasil penelitian oleh Krisna dan Suhardianto (2016) menyatakan ROA dan DER tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report* karena perusahaan yang memiliki kinerja baik cenderung kurang memperdulikan tanggung jawab sosial dan kurang sensitif terhadap reaksi investor akan resiko lingkungan yang akan ditimbulkan (Freedman dan Jaggi, 1988). Penelitian terkait *corporate governance* dilakukan oleh Aziz (2014) menyatakan bahwa dewan

komisaris, komite audit, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Rosyid *et al.* (2017) melakukan penelitian *corporate governance* yang diukur dengan komite audit dan dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Hal ini dikarenakan dengan semakin banyaknya rapat yang dilakukan direksi akan meningkatkan hubungan antar dewan direksi sehingga dapat terus memberikan pengawasan terhadap manajemen, salah satunya dalam kepatuhan peraturan perundang-undangan termasuk menerbitkan laporan yang bersifat mandatory maupun voluntary.

Berdasarkan penelitian di atas menunjukkan hasil yang berbeda maka peneliti ingin menguji kembali secara empiris pengaruh kinerja keuangan, ukuran perusahaan dan *corporate governance* terhadap pengungkapan *sustainability report* studi empiris pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI. Alasan pemilihan perusahaan non-keuangan karena adanya perbedaan dalam menganalisis kinerja keuangan antara perusahaan keuangan dengan non-keuangan karena dalam aktivitasnya terfokus pada keuangan (Sari dan Marsono, 2013).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*?
3. Apakah *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh:

1. Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.
2. Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.
3. *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*.

Selain tujuan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi literatur ilmu akuntansi, khususnya dalam kajian tentang *sustainability report*. selain itu juga dapat digunakan referensi bagi akademis maupun bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi perusahaan dalam melaksanakan pengungkapan *sustainability report*. Adanya *sustainability report* memungkinkan perusahaan untuk memberikan informasi *triple bottom line* kepada pihak eksternal tentang komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip *sustainability development*. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi pengambilan keputusan oleh manajemen.